

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perempuan sering kali disalah artikan sebagai identitas yang lemah dan tertindas. Khususnya perempuan di Afghanistan yang distereotipkan sebagai perempuan yang tunduk dan membutuhkan pemberdayaan dan pembebasan yang adil. Mereka merupakan korban yang paling merasakan akibat dari kekacauan yang ditimbulkan oleh konflik¹. Perempuan di Afghanistan telah lama menghadapi tantangan yang sangat kompleks, yang dipengaruhi oleh sejarah konflik berkepanjangan, struktur sosial yang patriarkal, serta manipulasi agama untuk kepentingan politik dan budaya. Selama lebih dari empat dekade, Afghanistan telah menjadi arena perang dan ketidakstabilan yang berkepanjangan, yang berdampak besar pada kehidupan perempuan. Banyak perempuan tidak memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta menghadapi hambatan signifikan dalam hal hak-hak dasar seperti kebebasan bergerak dan hak untuk mengambil keputusan sendiri.

Di Afghanistan sendiri ada beberapa kelompok bersenjata yang berusaha mencapai tujuannya sendiri dan salah satunya yaitu Taliban. Kata Taliban sendiri yang berarti “Mahasiswa”. Sementara itu, dalam Bahasa Persia dan Psthun, “thalib” menjadi Taliban². Pada awalnya Taliban ini terdiri dari mahasiswa yang bertujuan untuk mengakhiri perang saudara di Afghanistan untuk mengembalikan ketertiban dan keadilan dengan berdasarkan interpretasi ketentuan yang mereka percaya. Banyak pemimpin Taliban sebelum pembentukan kelompok ini bertempur melawan pendudukan Soviet pada tahun 1990-an.

¹ Rachman, A., Aulia, M., Abdulrab, N., Purwadi, Y., Fajar, MD, & Ayunda, AD (2020). Diplomasi Indonesia Dalam Memperkuat Komitmen Pemberdayaan Perempuan Untuk Mendukung Proses Perdamaian Afghanistan. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, Vol. 16, hal. 259-276.

² Ashghor, A. (2021). Taliban di Afghanistan: Tinjauan Ideologi, Gerakan dan Aliansinya dengan ISIS. *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 7, hal. 71-83.

Di beberapa daerah menganggap bahwa adanya Taliban ini memperkuat keamanan lokal dan memberikan perlindungan terhadap kejahatan dan ancaman dari kelompok-kelompok bersenjata lainnya terutama berlaku pada daerah yang mungkin tidak mendapatkan perlindungan dari pemerintah sentral. Taliban menemukan pijakan dan kekuatan mereka di Afghanistan selatan dengan melembagakan penafsiran terhadap ajaran dan ketentuan yang berdasarkan pada agama Islam.

Sejak tahun 1979, masyarakat Afghanistan telah menghadapi permasalahan berat dari kekejaman serangan Soviet, perang Taliban, pemberontakan lokal serta serangan Amerika Serikat setelah 9/11 yang melumpuhkan total kemakmuran dan perdamaian di Afghanistan kemudian terjadinya perang saudara besar-besaran antara komandan Mujahidin yang memperebutkan kekuasaan dan memecah belah ibu kota Kabul, sehingga banyak masyarakatnya yang mengalami kerugian baik secara materiil.

Melihat jauh ke belakang, rezim Taliban memainkan peran yang signifikan dalam memperburuk kondisi institusi dan perekonomian Afghanistan yang sudah rapuh akibat pertempuran selama beberapa dekade dahulu. Pada tahun 1990-an, Taliban secara tegas telah memberlakukan pembatasan sosial terhadap perempuan seperti membatasi akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan dan pekerjaan. Selain dari pihak Taliban, banyak pula pria Afghanistan yang masih sangat konservatif dalam melihat hal perempuan. Biasanya, pria atau kepala rumah tangga hanya akan mengizinkan anak perempuan mereka untuk mengenyam pendidikan dasar atau menengah dan kemudian dilanjutkan dengan pernikahan.

Kembali berkuasanya kelompok Taliban, pada 15 Agustus 2021 lalu setelah 20 tahun digulingkan oleh Amerika Serikat pada tahun 2001³. Studi Pererikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkapkan bahwa 80 persen perempuan Afghanistan mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

³ Nurfahidah, A., Dewi, YT, & Gustiana, DD (2022). Upaya United Nations Women (UN Women) dalam melibatkan Diskriminasi terhadap Perempuan di Afghanistan. *TRANSBORDERS: Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 5, hal. 102-114.

Berbagai pihak seperti Pemerintah Afghanistan, PBB dan negara Amerika Serikat telah menuntut hak-hak perempuan sebagai pembenaran atas perangnya terhadap Taliban. Disisi lain, Taliban yang memberlakukan kebijakan-kebijakan mencerminkan interpretasi mereka terhadap hukum dan nilai-nilai tradisional, yang sering kali dipandang sebagai cara mereka untuk melindungi dan menjaga moralitas serta kehormatan perempuan. Perempuan secara konsisten menentang pelanggaran yang dilakukan Taliban dan kembalinya sistem politik yang secara signifikan akan melemahkan hak-hak perempuan Afghanistan.

PBB terus menyerukan kepada otoritas de facto untuk memberikan kelonggaran atas pembatasan dari kebijakannya yang dianggap PBB sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang didasarkan pada perjanjian hak asasi manusia internasional termasuk dalam misi khusus yang diluncurkan oleh PBB yaitu United Nations Assistance Mission In Afghanistan (UNAMA).

Dibentuknya UNAMA ini pada tahun 2002 merupakan sebagai misi politik khusus yang dibentuk oleh PBB atas permintaan pemerintah Afghanistan yang saat itu konflik terjadi antara kelompok sipil. Badan ini telah melakukan berbagai bentuk bantuan, terutama dalam misi kemanusiaan untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas di Afghanistan⁴. Atas dasar tujuan dasar dari PBB sendiri bahwa UNAMA memberikan bantuan kepada pemerintah Afghanistan dalam memperkuat institusi-institusi nasional dengan mempromosikan hak asasi manusia, memfasilitasi dialog politik dan memberikan dukungan pada upaya rekonsiliasi nasional. Otoritas defacto Afghanistan telah mengabaikan seruan untuk mencabut pembatasan itu dan mengesampingkan kritik terhadap pemerintahan mereka, dengan mengatakan hal tersebut sesuai dengan budaya Afghanistan dan hukum Islam⁵. Karena bagaimanapun rakyat asli sendiri yang mengetahui apa yang menjadi panduan mereka.

⁴ Putri, L. D. R., & Khairunnisa, S. F. (2023). Alasan Pbb Memperpanjang Misi Unama Di Afghanistan. *Jurnal Pena Wimaya*, Vol. 3, hal. 8.

⁵ Gul, A. (2023, April 11). *PBB: Larangan Taliban Terhadap Staf Perempuan, Dapat Tutup Operasi di Afghanistan*. Retrieved April 16, 2024, from VOA Indonesia: <https://www.voaindonesia.com/a/pbb-larangan-taliban-terhadap-staf-perempuan-dapat-tutup-operasi-di-afghanistan/7045583.html>

Dialog inklusif yang dilakukan UNAMA dengan pemerintah Afghanistan, Taliban dan masyarakat sipil, termasuk kelompok perempuan untuk mendukung pernyataan perempuan dalam proses perundingan dan memastikan bahwa kebutuhan dan perspektif perempuan di akomodasi dalam pembentukan masa depan Afghanistan. Dan melihat dari lanskap politik yang kompleks di bawah pemerintahan Taliban telah menghadirkan hambatan besar besar bagi misi UNAMA untuk secara efektif mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Dalam kondisi tersebut, UNAMA terus bekerja ekstra keras untuk mencapai tujuannya, menghadapi berbagai dinamika politik dan sosial yang menantang di Afghanistan.

Upaya bantuan kemanusiaan United Nations Assistance Mission In Afghanistan (UNAMA) dalam menyoroti hak perempuan di Afghanistan ini yang menjadi daya tarik bagi penulis untuk menyoroti sejauh mana upaya misi bantuan yang dilakukan oleh UNAMA dalam mendukung hak perempuan di tengah sistem patriarki yang terjadi di Afghanistan pada masa pemerintahan Taliban, selain itu isu ini menjadi penting karena sudah lebih dari beberapa dekade isu ini masih terasa kental bagi beberapa perempuan di Afghanistan dan menyoroti bagaimana dampak yang dirasakan dengan adanya isu patriarki di Afghanistan. Dari paparan yang telah disampaikan diatas, penulis mengajukan mengenai apa saja hal yang menjadi belum berhasilnya dari misi bantuan yang dilakukan oleh UNAMA di Afghanistan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan kan di atas, penulis ingin mengetahui apa yang menjadi penyebab belum berhasilnya bantuan kemanusiaan yang dilakukan UNAMA dalam mengatasi sistem patriarki yang mempengaruhi perempuan di Afghanistan pada masa pemerintahan Taliban. Dengan menggali lebih lanjut tentang kendala-kendala dan tantangan yang dihadapi. Penulis juga berupaya mengidentifikasi strategi yang mungkin diadopsi oleh UNAMA untuk mengatasi tantangan-tantangan ini serta menilai efektivitas pendekatan yang sudah diterapkan dalam menciptakan perubahan.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai peneliti yaitu :

1. Bagaimana kebijakan sistem patriarki yang dilakukan oleh Taliban merenggut hak perempuan di Afghanistan.
2. Bagaimana upaya intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh UNAMA untuk mengembalikan kembali hak-hak perempuan di Afghanistan.
3. Mengidentifikasi penyebab dari ketidakadilan atau kegagalan intervensi kemanusiaan yang dilakukan UNAMA.

1.4 Kegunaan Penelitian

Diharapkan bahwa dari penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan manfaat sebagai kepentingan bahan pembelajaran dan menjadi bahan referensi berbagai aspek mengenai hal yang berkaitan dengan Sistem Patriarki dan Hak Asasi Perempuan, serta penelitian ini dapat berfungsi sebagai panduan yang bermanfaat dalam konteks Hubungan Internasional, khususnya dalam mengatasi sistem patriarki. Demikianlah, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman dan memperkaya wawasan para pembaca, serta penulis berharap bahwa pembaca dapat lebih memahami isu-isu global yang terkait dengan hak asasi manusia dan tantangan yang dihadapi dalam upaya mencapai kesetaraan.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan peneliti ini terdiri atas lima bab yang masing-masing memiliki titik berat yang berbeda, akan tetapi masih pada satu kesatuan yang saling mendukung dan tentu saling melengkapi.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang mana dimulai dengan menjelaskan latar belakang permasalahan yang melandasi pemilihan judul, diikuti oleh rumusan masalah, pertanyaan penelitian tujuan penelitian dan hipotesis.

Bab kedua, berisi mengenai pemaparan tinjauan pustaka yang mencakup penjelasan tentang teori dan konsep yang relevan dengan penelitian ini, serta perbandingannya dengan penelitian terdahulu yang relevan.

Bab ketiga, berisi pembahasan mengenai metode penelitian yang mencakup pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan dan pengolahan data, serta aspek, dimensi dan parameter yang relevan.

Bab keempat, berisi tentang penguraian hasil temuan peneliti secara sistematis melalui sub-bab untuk mendukung jawaban terhadap rumusan masalah.

Bab kelima, melakukan analisis terhadap hasil penelitian yang diklasifikasikan sesuai dengan rumusan masalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Bab keenam, sebagai bab akhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti. Kesimpulan ini diharapkan memberikan pemahaman yang cukup terhadap isu yang dibahas dan menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian di masa mendatang.

